



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 010 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Agustus Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp6.243.838.931.960,00 bertambah/berkurang sebesar Rp1.880.399.936.371,00 sehingga menjadi Rp8.124.238.868.331,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. semula | Rp6.278.838.931.960,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.576.148.659.321,00</u> |
| jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp7.854.987.591.281,00 |

b. belanja daerah

1. semula	Rp6.243.838.931.960,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.880.399.936.371,00</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp8.124.238.868.331,00

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan pembiayaan

a) semula	Rp50.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp374.812.527.050,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp424.812.527.050,00

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula	Rp85.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp70.561.250.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp155.561.250.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp269.251.277.050,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah

1. semula	Rp3.712.293.569.960,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp571.484.675.901,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp4.283.778.245.861,00

b. pendapatan transfer

1. semula	Rp2.502.089.562.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.011.970.120.172,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.514.059.682.172,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula	Rp64.455.800.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (7.306.136.752,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp57.149.663.248,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah

1. semula	Rp2.935.210.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 608.401.876.638,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp3.543.611.876.638,00

b. retribusi daerah

1. semula Rp29.061.817.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp(1.660.329.640,00)

jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp27.401.487.360,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1. semula Rp42.854.009.600,00

2. bertambah/(berkurang) Rp3.380.702.603,00

jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp46.234.712.203,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. semula Rp705.167.743.360,00

2. bertambah/(berkurang) Rp(38.637.573.700,00)

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp666.530.169.660,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari

a. transfer pemerintah pusat

1. semula Rp2.502.089.562.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp1.011.970.120.172,00

jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan Rp3.514.059.682.172,00

b. transfer antar daerah

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah transfer antar daerah
setelah perubahan Rp0,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari

a. pendapatan hibah

1. semula Rp64.455.800.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp(7.306.136.752,00)

jumlah hibah setelah perubahan Rp57.149.663.248,00

b. dana darurat

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasional

1. semula	Rp4.011.736.519.999,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp645.519.947.821,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp4.657.256.467.820,00

b. belanja modal

1. semula	Rp941.952.411.961,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp359.561.654.305,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.301.514.066.266,00

c. belanja tidak terduga

1. semula	Rp80.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.198.567.528,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp82.198.567.528,00

d. belanja transfer

1. semula	Rp1.210.150.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp873.119.766.717,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp2.083.269.766.717,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas

a. belanja pegawai

1. semula	Rp1.791.532.508.622,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp176.310.528.626,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.967.843.037.248,00

b. belanja barang dan jasa

1. semula	Rp1.930.241.209.177,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp426.984.906.341,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp2.357.226.115.518,00

c. belanja bunga

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp0,00

d. belanja subsidi

1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00

e. belanja hibah

1. semula	Rp283.322.802.200,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp43.744.512.854,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp327.067.315.054,00

f. belanja bantuan sosial

1. semula	Rp6.640.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.520.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp5.120.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula	Rp178.398.782.427,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.750.000.000,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp195.148.782.427,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula	Rp129.285.775.569,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp102.165.892.601,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp231.451.668.170,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula	Rp88.101.652.400,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp48.814.164.775,00</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp136.915.817.175,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula	Rp492.125.553.165,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp162.611.315.483,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp654.736.868.648,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula Rp54.040.648.400,00

2. bertambah/(berkurang) Rp29.220.281.446,00

jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp83.260.929.846,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula Rp80.000.000.000,00

b. bertambah/(berkurang) Rp2.198.567.528,00

jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp82.198.567.528,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1. semula Rp1.210.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp873.269.766.717,00

jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp2.083.269.766.717,00

b. belanja bantuan keuangan

1. semula Rp150.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp(150.000.000,00)

jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp00,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula Rp50.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp374.812.527.050,00

jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp424.812.527.050,00

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp85.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp70.561.250.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp155.561.250.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp50.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp374.812.527.050,00</u> |

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp424.812.527.050,00
---	----------------------

b. pencairan dana cadangan

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
--	--------

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
--	--------

d. penerimaan pinjaman daerah

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
---	--------

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
---	--------

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp0,00
---	--------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp75.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp25.000.000.000,00</u> |

jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp100.000.000.000,00
--	----------------------

b. penyertaan modal daerah

1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp45.561.250.000,00</u>
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp55.561.250.000,00

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp0,00

d. pemberian pinjaman daerah

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Oktober 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Oktober 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 10**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (8-178/2022).